

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OFF  
BALANCE SHEET PADA BANK SYARIAH MANDIRI  
MENURUT *FIQH MUAMALAH*  
(Study Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kotabumi. Lampung Utara )**



**Skripsi**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**PUJI DARMA YANTI  
NPM : 1521030103**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OFF  
BALANCE SHEET PADA BANK SYARIAH MANDIRI  
MENURUT *FIQH MUAMALAH***

**(Study Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kotabumi. Lampung  
Utara )**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**PUJI DARMA YANTI  
NPM : 1521030103**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Drs. Susiadi AS.,M.Sos.I.**

**Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.Si**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Oleh:  
DarmaYanti

Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Sebagai lembaga keuangan masalah Bank yang paling utama adalah dana. Prinsip operasional Islam yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat salah satunya yaitu prinsip *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah* sebagai sebuah kerjasama, namun pencatatan transaksinya dilakukan secara *Off Balance Sheet* karena bank tidak mencatat dalam neraca Bank, tetapi hanya di catat dalam rekening administratif saja. Disebut *mudharabah* karena skemanya bagi hasil, *muqayyadah* karena ada pembatasan.

Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya adalah: bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Mandiri kotabumi, bagaimana resiko pembiayaan terhadap kegagalan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya dan tingkat kesehatan yang mendukung pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Mandiri kotabumi, dan bagaimana akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* menurut fiqh muamalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Mandiri, untuk mengetahui resiko pembiayaan terhadap kegagalan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya dan tingkat kesehatan yang mendukung pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Mandiri, dan untuk mengetahui bagaimana akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* menurut fiqh muamalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang kotabumi Lampung utara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian ini diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Cabang Kotabumi Lampung Utara yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview, dan diperkaya dengan data kepustakaanya itu mempelajari, memahami buku-buku, jurnal, serta tulisan cendekiawan yang berkaitan dengan objek penelitian, sampel yang diambil sebanyak 4 orang yang terdiri dari 4 orang karyawan di bank.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Mandiri disebabkan karena kurangnya dana untuk membuka suatu usaha yang di inginkan. Dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri, pihak bank akan mempertimbangkan terlebih dahulu menyetujui atau tidak nasabah meminjam dana tersebut. Resiko adalah ancaman atau tindakan yang menimbulkan dampak pada pembiayaan. Resiko muncul jika bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok yang sedang dilakukannya. Faktor yang menyebabkan nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya dikarenakan nasabah sedang dilanda musibah. Seperti: Sakit, pihak yang bersangkutan meninggal dunia, atau sedang masa operasi.

Penilaian kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu: pemilik, pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Tingkat kesehatan bank disebabkan karena nasabah yang aktif dan bertambahnya nasabah baru. Berdasarkan pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* menurut *fiqh muamalah* ini hukumnya sah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan adanya ketentuan tersebut di harapkan kedua belah pihak yang melakukan akad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban terpenuhinya ijab dan qabul.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET PADA BANK SYARIAH MANDIRI MENURUT FIQH MUAMALAH** (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cab. Kotabumi, Lampung Utara)

Nama : **PUJI DARMA YANTI**

NPM : **1521030103**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Mu'amalah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs.Susiadi AS.,M.Sos.I.  
NIP. 195808171993031002

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si  
NIP.197304142000032002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.  
NPM. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: *IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET* PADA BANK SYARIAH MANDIRI MENURUT *FIQH MUAMALAH* (Study Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kotabumi. Lampung Utara). Disusun oleh Puji Darma Yanti, NPM 1521030103, Jurusan Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: Selasa, 09 September 2019.

**TIM DEWAN PENGUJI:**

Ketua : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Muhammad Jayus, MHI (.....)

Penguji Utama : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M.(.....)

Penguji pendamping I : Drs. Susiadi AS., M. Sos.i. (.....)

Penguji pendamping II: Yuli Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.(.....)



Mengetahui,  
Fakultas Syariah

H. Khoiruddin, M.H.

NPM. 197009011997031002





## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: *Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu...*(QS. Al-Maidah ayat:1).\*



---

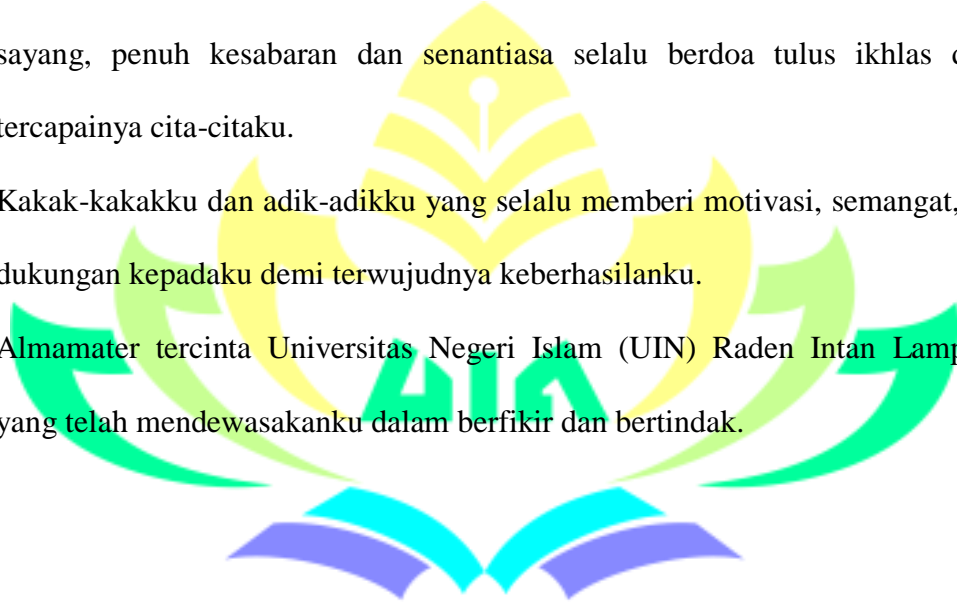
\* Al-Aliyy, Al-Qur'an Dan terjemahannya, (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2006), h. 84



## PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupersembahkan kepada-Mu Tuhan yang Maha Esa, atas takdirmu kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku. Maka dari itu skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormatku tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sudarman dan Ibunda Jumiye yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakak-kakakku dan adik-adikku yang selalu memberi motivasi, semangat, dan dukungan kepadaku demi terwujudnya keberhasilanku.
3. Almamater tercinta Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanmu dalam berfikir dan bertindak.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis Mempunyai nama lengkap Puji Darma Yanti lahir di Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 05 Oktober 1996 anak ke-9 dari 13 bersaudara, dari pasangan Bapak Sudarman dan Ibu jumiye.

Menyelesaikan pendidikan dasar di :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 06 Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Lampung Utara lulus pada tahun 2009.
2. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 1 Kotabumi Lampung Utara yang selesai pada tahun 2012.
3. Lalu melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 01 Kotabumi Lampung Utara yang lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Strata Satu Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas karunia-Nya dan ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET PADA BANK SYARIAH MANDIRI MENURUT *FIQH MUAMALAH* (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cab. kotabumi, Lampung Utara) dapat penulis selesaikan.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini sesuai dengan rencana, tak lupa dihaturkan terimakasih sebanyak-banyaknya. Secara rinci ucapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba Ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa/I;
3. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Juhrotul Khulwah selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku pembimbing I dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini terselesaikan;
5. Para Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusan muamalah
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Pihak Bank Syariah Mandiri cabang Kotabumi, Lampung Utara, yang telah bersedia menjadi narasumber untuk perlengkapan data dalam skripsi ini.
8. Beasiswa BIDIKMISI, yang memberikan kesempatanku untuk mendapatkan beasiswa tersebut sampai akhir semester 8, sehingga si penulis bisa menyelesaikan SI tanpa kendala ekonomi.
9. Terbaikku Tony Irawan, yang sudah memberikan bantuan dalam tenaga maupun materi, semangat dan motivasi, serta doa untuk keberhasilanku.
10. Keluarga AMPIBIku, M. Iqbal fadil, Aulia Rahma, Mei Sari, Kiki, Ridwan Mardianto, Renaldi, Alfian, Agus Salim, Khafidah, Ami, indri, Rieke, Avi, Cici, Febi, Okta, Arif wifandana, dan yang lainnya tak bisa disebutkan satu persatu yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsiku.
11. Sahabat-sahabatku Novita Permata Sari, Juliana Rahmawati, Ulfa Azela Nabela yang slalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsiku.

12. Nur Asiah S.E, Nikmatul Fitri, Laelatul Mukarromah S.H, Yuli Sri lestari S.H dan Dwi Okta S.H yang sudah memberi semangat, motivasi dan doa untuk keberhasilanku.
13. Rekan-rekan Mahasiwa Fakultas Syari'ah khususnya Mu'amalah A 2015 yang telah membantu penulisan baik tenaga, Motivasi semangat untuk penyelesaian skripsi ini. Rekan-rekan KKN Kelompok 132 desa mekar mulya, palas yang tidak bisa disebutkan satu per satu;
14. Almamater tercinta.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran sehingga laporan penelitian ini akan lebih baik dan sempurna.

Saya berharap semoga hasil penelitian ini betapapun kecilnya kiranya dapat memberikan masukan dalam Implementasi Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* pada Bank Syariah Mandiri Menurut *Fiqh Muamalah* yang sesuai dengan ijab qabul, rukun dan syarat berdasarkan *Fiqh Muamalah*, Amiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

**Bandar Lampung, 25 Agustus 2019**  
**Penulis**

**Puji Darma Yanti**  
**NPM: 1521030103**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	iii
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN .....	vi
SURAT PERNYATAAN .....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	8

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Mudharabah	
1. Akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i>	
a. Pengertian Akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i> .....	14
b. Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i> .....	20
c. Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i> .....	22
d. Prinsip Akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i> .....	25
e. Perkara yang membatalkan Akad.....	26
2. Akad <i>Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet</i>	
a. Pengertian Akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i> .....	28
b. Ketentuan Akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i> .....	30
c. Karakteristik Akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i> .....	31
d. Kriteria Akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i> .....	32
3. Pengertian akad <i>mudharabah muqayyadah off Balance sheet</i> menurut <i>Fiqh Muamalah</i> .....	33
B. Tinjauan Pustaka.....	34

### BAB III GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Tentang BSM KC Kotabumi .....	39
B. Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet</i> di BSM .....	60
C. Resiko pembiayaan dan Tingkat kesehatan di BSM .....	66

### BAB IV ANALISIS

A. Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet</i> pada Bank Syariah Mandiri Kotabumi .....	69
B. Resiko pembiayaan dan Tingkat kesehatan.....	72

C. Akad <i>Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet</i> menurut <i>fiqh muamalah</i> .....	74
---	----

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan 76	
B. Saran .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pada penegasan judul, menjelaskan pengertian judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahan makna. Skripsi ini berjudul “**Implementasi Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Bank Syariah Mandiri menurut Fiqh Muamalah** (Study Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kotabumi, Kab. Lampung Utara ).” Untuk itu penulis uraikan secara singkat mengenai judul di atas, yaitu :

Implementasi atau pelaksanaan, penerapan adalah pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.<sup>1</sup> Implementasi yang dimaksud dalam judul ini yaitu Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* menurut *Fiqh muamalah* Pada Bank Syariah Cabang Kotabumi, Kab. Lampung Utara.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.<sup>2</sup>

*Mudharabah Muqayyadah*, yaitu akad *mudharabah* di mana *shahibul mal* membatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.<sup>3</sup>

*Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*, merupakan konsep penyaluran langsung dana mudharabah kepada para pelaksana usahanya.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 529

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 170

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010 ), h. 77

Pencatatan transaksinya di Bank Syariah Mandiri dilakukan secara *off balance sheet*, karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.<sup>4</sup>

Bank Syariah Mandiri adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.<sup>5</sup>

*Fiqh Muamalah* adalah hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka rangkaian kata pada judul dimaksud adalah suatu penerapan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Mandiri menurut *Fiqh Muamalah* dalam produk Bagi Hasil dengan prinsip *Mudharabah muqayyadah off Balance sheet*.

## **B. Alasan Memilih Judul**

1. Alasan *Objektif*, Karena pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini tidak dicatat di dalam neraca Bank, namun dicatat pada neraca khusus diluar itu. Resiko pembiayaan terhadap kegagalan nasabah

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 93

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Stim Ykpn, 2016), h. 105

<sup>6</sup> Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Prenadamedia Group, 2015), h. 2

atau pihak lainnya dalam mengembalikan kewajibannya dan tingkat kesehatan yang mendukung pelaksanaan *akad mudharabah muqayyadah off Balance Sheet* pada Bank Syariah Mandiri menurut *Fiqh Muamalah* Cab. Kotabumi, Kab. Lampung Utara. Maka penelitian ini di anggap perlu untuk diteliti lebih dalam.

2. Alasan *Subjektif*, Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan strata 1 (S1) yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syariah, dimana penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperbanyak pengetahuan, ditinjau dari aspek bahasa judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengendalikan bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Salah satu bank di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah yaitu Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak

membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akadnya.<sup>7</sup> Seperti yang diketahui Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang harus terbebas dari unsur riba. Sesuai dengan firman Allah mengenai pemahaman riba :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(Q.S Al-Baqarah: 275).<sup>8</sup>

Penggalan ayat diatas menjelaskan mengenai pengharaman riba dalam situasi bisnis ataupun transaksi. Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi Bank dengan prinsip Syariah. Layaknya sebuah perusahaan, Bank Syariah Mandiri juga harus bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara dana masyarakat yang menghasilkan *profit* dengan tidak meninggalkan prinsip Syariah.

Bank Syariah Mandiri harus bisa menunjukkan keberadaannya sebagai lembaga keuangan yang lebih baik dalam proses pembiayaan dari bank yang menggunakan sistem bunga. Karena eksistensi bunga itu sendiri diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam, maka itu Bank Syariah tidak menganut sistem bunga. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri juga dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi nasabah maupun bank. Bank Syariah Mandiri sebagai bank dengan prinsip bagi hasil atau

---

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, Ed-1* (Jakarta: Prenada Media Group,2011), h. 32

<sup>8</sup> Al-Aliyy, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2006), h. 36

keuntungan yang sesuai bagi pemilik dana simpanan dan bagi para investor demi kelangsungan usahanya.<sup>9</sup>

Sebagai lembaga keuangan masalah Bank yang paling utama adalah dana. Sebagai sebuah lembaga keuangan, bank syariah mandiri juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dan dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional Islam yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat salah satunya yaitu prinsip *mudharabah*.<sup>10</sup> *Mudharabah* sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum.<sup>11</sup> Secara umum bentuk akad *mudharabah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. ketentuan prinsip *mudharabah muthlaqah* adalah *shahibul maal* tidak dapat memberikan batas-batasan terhadap dana yang diinvestasikan. Dengan demikian *mudharib* diberi kewenangan penuh untuk mengolah dana tanpa keterikatan waktu, tempat, bentuk usaha dan jenis pelayanan. Pada akad *mudharabah muqayyadah*, *shahibul maal* memberikan batas jenis usaha, waktu, atau

---

<sup>9</sup>. Alfiah Istikomah, Skripsi: *pengaruh Capital Adequaty Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Non Performing Financing (NFF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil PT.Bank Syariah Mandiri*, (Bandar Lampung: 2018), h.5

<sup>10</sup> NuruL Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010 ), h. 86

<sup>11</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Stim Ykpn, 2016), h.106

tempat usaha.<sup>12</sup> Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad.<sup>13</sup>

Penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus di patuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan di biyai dan pelaksana usahanya. Pencatatan transaksinya di bank syariah mandiri dilakukan secara *off Balance Sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Disebut *Mudharabah* karena skemanya bagi hasil, *Muqayyadah* karena ada pembatasan, yaitu hanya untuk pelaksana usaha tertentu, dan *off Balance Sheet* karena bank tidak mencatat dalam neraca bank, tetapi hanya di catat dalam rekening administratif saja .<sup>14</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokoknya yaitu :

---

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, Ed-1* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012), h.197

<sup>13</sup> Imam mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer, Ed-1, cet-1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 157-158

<sup>14</sup> Adiwarman, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Ed-5, Cet-6* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 213

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* Pada Bank Syariah Mandiri Kotabumi ?
2. Bagaimana resiko pembiayaan terhadap kegagalan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya dan tingkat kesehatan yang mendukung pelaksanaan akad *Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet* pada Bank Syariah Mandiri Kotabumi ?
3. Bagaimana implementasi akad *mudharabah muqayyadah off Balance Sheet* menurut *Fiqh muamalah* ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan akad *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank syariah Mandiri kotabumi.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana resiko pembiayaan terhadap kegagalan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya dan tingkat kesehatan yang mendukung pelaksanaan akad *Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet* pada Bank Syariah Mandiri kotabumi.
- c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *mudharabah muqayyadah off Balance Sheet* menurut *Fiqh Muamalah*.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan masyarakat tentang teori dan praktek mengenai akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yang sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri.



- b. Dapat dijadikan bahan acuan atau sebagai pendorong bagi peneliti-peneliti lain yang bermaksud untuk meneliti permasalahan yang serupa pada lokasi yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah penyidikan atau pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Jadi, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode *kualitatif*, Penelitian *kualitatif* adalah jenis penelitian yang menghasilkan suatu temuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau *kuantifikasi* (pengukuran), melainkan diperoleh dari data yang bercorak *kualitatif*, dengan pendekatan *induktif*. Alasannya metode *kualitatif* dengan pendekatan *induktif* lebih relevan dalam mengolah data. Untuk menghasilkan gambaran yang baik dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi di Bank Syariah Mandiri

suatu saat nanti. Dalam hal ini langsung mengamati mengenai implementasi akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* menurut *Fiqh Muamalah* di Bank Syariah Mandiri Kotabumi, Kab. Lampung Utara.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskripsif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan melaporkan suatu keadaan obyek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis. Dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang implementasi akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* menurut *Fiqh muamalah* pada Bank Syariah Mandiri Kotabumi, Kab. Lampung Utara.

**2. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua sumber baik yang melekat dengan data Bank Syariah Mandiri Cabang Kotabumi, Kab. Lampung Utara maupun yang menjadi penunjang terhadap data bank tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang dapat memberikan informasi langsung kepada penelitian, yaitu karyawan Bank Syariah Mandiri Kotabumi, Kab. Lampung Utara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku Fiqh Muamalah, buku-buku yang berkaitan dengan akad-akad, buku Lembaga Keuangan Syariah, dokumen-dokumen, dan jurnal, maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.<sup>15</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah *generalisasi* yang terdiri atas, objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah 4 orang karyawan dan 120 nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kotabumi Bank Syariah Mandiri Cabang Kotabumi.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel

---

<sup>15</sup> Moh.Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 64

yang diambil dari populasi itu.<sup>16</sup> Selanjutnya teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maka sampel ini lebih cocok sebagai sumber data. Sampel yang *purposif* adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian yang didasarkan ciri-ciri dan karakter populasi.<sup>17</sup>

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian yaitu 14 orang yang terdiri dari 4 karyawan Bank dan 10 nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kotabumi, yang dipilih sebagai sampel dalam riset ini karena mereka dianggap *representatif* bagi Banknya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah usaha untuk mendapatkan data secara langsung dengan cara melihat, mendengar, mengamati dan merasakan hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi *akad Mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Mandiri menurut *Fiqh Muamalah*

---

<sup>16</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cv, 2011), h. 80

<sup>17</sup>Muhammad, *Metodelogi penelitian Ekosnomi Islam, Cet-2* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), h. 179

untuk kemudian dijadikan sebuah data berdasarkan gagasan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai karyawan bagian umum Bank Syariah Mandiri Kotabumi, Kab. Lampung Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan yang dapat berupa surat kabar, majalah, buku tertulis dari objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data tentang Implementasi akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah menurut *Fiqh Muamalah* di Bank Syariah Mandiri kotabumi, Kab. Lampung Utara.

**5. Metode Pengolahan Data**

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) : yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan untuk diproses atau di olah lebih lanjut. Dalam hal ini peneliti akan

mengambil data yang akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah saja.

- b. Penemuan Hasil : yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
- c. Pemaknaan data : yaitu pengumpulan data dari hasil catatan yang dilakukan pada waktu lampau.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* analisis dimana mendeskripsikan tentang masalah yang ada, kemudian menganalisisnya dan dilakukan sebelum memasuki lapangan. Analisis data ini menjadi salah satu pegangan dalam penelitian. Metode ini digunakan penulis untuk mendeskripsikan data-data mengenai Implementasi Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* menurut *Fiqh Muamalah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kotabumi, Kab. Lampung Utara.

Metode *deduktif* adalah metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan umum dimana digunakan untuk menilai kejadian kasus. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* pada Bank Syariah Mandiri menurut *Fiqh Muamalah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kotabumi, Kab. Lampung Utara.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Mudharabah

##### 1. Akad *Mudharabah Muqayyadah*

###### a. Pengertian Akad *Mudharabah Muqayyadah*

Akad *Mudharabah* atau *Qirad* adalah kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lain menjadi pengelola atau pengusaha (*mudharib*).<sup>18</sup> Akad ini adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dalam mudharabah dibagi menurut kesepakatan diawal kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian modal, sedangkan apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>19</sup> Melalui *Qirad* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.<sup>20</sup> Keuntungan dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan kerugian akan ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola.<sup>21</sup> Peranan Bank dengan akad *Mudharabah*, bank bertindak sebagai *mudharib* dalam menjalankan usaha (bank), ketika menerima dana dari

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 69

<sup>19</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *konstruksi Aakad*, dalam *Jurnal Al-Adalah Hukum Islam*, No. 3, 2015, h. 495

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Ed-1* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 106

<sup>21</sup> Fathurrahman Rauf, *Perbankan Syariah VIS A VIS Perbankan Konvensional: Tinjauan Hukum Islam atas konsep dan penerapan*, *Al-Adalah*, vol. 10, no 1 (2011), h. 50



masyarakat, dan nasabah ini bertindak sebagai *shahibul mal*, dan dapat ditempatkan dalam giro, tabungan dan deposito. Sebaliknya, bank dapat pula bertindak sebagai *shahibul mal*, dengan menyediakan modal bagi suatu usaha, bagi nasabah sebagai *mudharib*.<sup>22</sup> Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah Muqayyadah*, yaitu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (*mudharib*), bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dari nasabah yang meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter, dan aspek usaha yang meliputi analisis kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha.<sup>23</sup> Akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.

Bentuk kontrak antara kedua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Atau singkatnya akad *mudharabah* adalah

---

<sup>22</sup> FORDEBI ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, Ed-1, Cet-1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 40

<sup>23</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) h. 12

Persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.<sup>24</sup>

Definisi terminologi bagi *mudharabah* diungkapkan oleh beberapa ulama mazhab sebagai berikut :

- a) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- b) Hambali berpendapat bahwa *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tentu kepada orang yang mengusahakan dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.
- c) Menurut *Sayyid Sabiq*, *mudharabah* adalah akad di antara dua belah pihak di mana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan.<sup>25</sup>
- d) Sementara *Madzhab Malikiyah* mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.<sup>26</sup>

Setelah diketahui beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (*shahibul al-mal*) dengan

---

<sup>24</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, Ed. 3. Cet.3 (Jakarta:PT. RajaGrafindo persada, 2006), h. 204

<sup>25</sup> Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, Cet-2 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 59

<sup>26</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Ed-1, Cet-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 147

pengelola usaha (*mudharib*), dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dibagi berdua sesuai kesepakatan.

Sedangkan menurut istilah syara' *mudharabah* berarti akad kerjasama antara kedua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai perjanjian yang disepakati. Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam akad, bermufakat dua orang padanya dengan keuntungan, modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan akan dibagi diantara mereka.

Akad *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>27</sup> Apabila rugi, kerugian tersebut ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, pengelola yang bertanggung jawab.<sup>28</sup> Kewajiban *sahibul mal* dalam perjanjian *mudharabah* terbatas (*mudharabah muqayyadah*) pada kontribusi modalnya. Hal ini merupakan kewajiban dan poin penting dalam perjanjian *mudharabah*, karena tidak tepat apabila *shahibul mal* sebagai partner pasif dengan kewajiban tidak terbatas. *Mudharib* tidak diperkenankan untuk melakukan bisnis lebih dari modal yang disetorkan oleh

---

<sup>27</sup> Muhammad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademik manajemen perusahaan YKPN, 2016), h. 22

<sup>28</sup> Khoerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 33

*shahibul mal*. Jika ia melakukannya atas kehendak sendiri, dia tidak berhak atas keuntungan dan juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi.<sup>29</sup>

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat dipahami dan dapat kita simpulkan bahwa *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (*rab al-mal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* (pengusaha/skill man) untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan tenaga, keterampilan, dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak.<sup>30</sup> Sebagaimana dijelaskan *Ibnu Rusyd*, ketentuan hukum yang berlaku dalam akad yang telah berakhir itu:

- a. Jika modal masih tersisa, maka modal tersebut menjadi utang pengelola (Bank) yang harus dibayarkan kepada pemilik modal (nasabah).
- b. Jika seluruh modalnya habis, maka ada 3 pendapat para ulama, yaitu: menurut *Imam Maliki*, pembiayaan *mudharabah* tersebut diperlakukan seperti akad *mudharabah* sejenisnya (*qiradh al-mitsi*), maka modal yang tersisa menjadi utang pengelola (Bank) yang harus dibayarkan kepada pemilik modal (nasabah).

Menurut *Imam Syafi'i* dan *Imam Abu Hanafiah*, Pembiayaan *Mudharabah* Tersebut diperlakukan seperti akad *ijarah l-mitsl*. Maka nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul al-mal*) mendapatkan total modal yang pernah

---

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah, Cet-1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.

<sup>30</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Ed-1, Cet-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 148

diberikan kepada bank sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan bank sebagai pengelola (*mudharib*) mendapatkan upah sebesar upah umum (*ajr al-mitsl*) atas jasanya dalam mengelola usaha.<sup>31</sup>

Akad *Mudharabah Muqayyadah* adalah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.<sup>32</sup> Bank dapat bertindak sebagai pemilik maupun pengelola dana, apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *Mudharabah*. Apabila Bank sebagai pengelola dana maka dana yang diterima dalam *Mudharabah Muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi.<sup>33</sup> Penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.<sup>34</sup>

Dalam *mudharabah Muqayyadah*, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya, pengelola modal harus berdagang barang tertentu, di daerah-daerah tertentu,

---

<sup>31</sup> Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, Ed-1, Cet-1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 194

<sup>32</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, cet-2* (Jakarta: PT RajaGrafindopersada, 2017) h. 211

<sup>33</sup> Osmad Muthater, *Akuntansi Perbankan Syariah, Cet-1* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 149

<sup>34</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) h. 227

dan membeli barang pada orang tertentu.<sup>35</sup> *Mudharabah muqayyadah* ini juga disebut dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.<sup>36</sup> Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan dengan pemilik modal saat akad.<sup>37</sup>

#### **b. Dasar Hukum Akad *Mudharabah Muqayyadah***

Islam memandang *Mudharabah* merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Secara umum, landasan dasar syari'ah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (*mubah*). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwanya Rasulullah Saw telah bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Ada tiga perkara yang diberkati, jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.”

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang dia mensyaratkan : “Harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa

<sup>35</sup> Mardani, *hukum sistem ekonomi Islam*, Ed-1, Cet-1 (Jakarta: Rajawalipers, 2015) h.

<sup>36</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, cet-1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 198

<sup>37</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.157

menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku.” *Qiradh* atau *mudharabah* menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi rasul, Muhammad telah melakukan qiradh, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke *Syam* untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.<sup>38</sup>

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai rujukan dasar suatu pembiayaan yaitu Al-Qur'an Surah Al-Maidah, Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*

*Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.*

*Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 1).*<sup>39</sup>

Maksud dari ayat diatas yaitu : akad suatu perjanjian mencakup janji prasetia Hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Ini merupakan perintah Allah kepada Hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk mengerjakan konsekuensi dari pada iman, yaitu memenuhi janji, yakni menyempurnakannya, melengkapinya, tidak membatalkan dan tidak mengurangi. Misalnya, akad antara seseorang dengan

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed-1, cet-9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 138

<sup>39</sup> Al-Aliyy, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2006), h. 84



yang lain dalam akad mu'amalah, seperti jual beli, menyewa dan sebagainya. Termaksud akad *Tabarru'at* (kerelaan), seperti hibah dan sebagainya. Bahkan termasuk pula memenuhi hak kaum muslimin yang telah Allah akadkan hak itu diantara mereka, dengan cara tolong menolong diatas kebenaran, membantunya, saling bersikap lembut dan tidak memutuskan hubungan.

### c. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah Muqayyadah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah :<sup>40</sup>

#### 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal dan lainnya menjadi pelaksana usaha.

#### 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, dan lain-lain.

#### 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*, pemilik dana setuju dengan perannya untuk

---

<sup>40</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, Ed. 3. Cet.3 (Jakarta:PT. RajaGrafindo persada, 2006), h. 205

mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4) Nisbah keuntungan.

a) Nisbah adalah rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul mal* ataupun *mudharib*. *Shahibul mal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.

b) Perubahan keuntungan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad, tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan jumhur ulama itu, selain ijab dan qabul, sebagai syarat akad *mudharabah*.<sup>41</sup>

Syarat-syarat sah *Mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1) *Shahibul mal* dan *mudharib*

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal ini karena *mudharib* bekerja atas perintah dari

---

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet-2* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), h.

<sup>42</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 139

pemilik modal dan itu mengandung unsur *wakalah* yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit dan lain-lain.

2) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batang (*tabar*), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.

3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4) Modal harus tunai bukan utang dan harus diserahkan kepada mitra kerja.

5) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf* (Pemecatan), maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.

6) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat dan harus sesuai dengan kesepakatan bersama.

7) *Sighat ijab* dan *qabul*

*Sighat* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan

uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola. Apabila telah terpenuhi *ijab* dan *qabul*, maka akad *mudharabah*-nya telah sah.

- 8) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu.

#### **d. Prinsip Akad *Mudharabah Muqayyadah***

Prinsip pokok akad *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) *Mudharabah* adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan/uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsertakan Bank, reksadana, atau institusi, dan orang lainnya.
- 2) Seorang *mudharib* yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hukum dan badan usaha.
- 3) *Rabbul mal* harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya, selain dari pada piutang, dengan nilai valuasi yang disepakati bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya pada *mudharib*.
- 4) Pengelolaan usaha *mudharabah* harus dilakukan secara eksklusif oleh *mudharib* dengan kerangka kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak *mudharabah*.

---

<sup>43</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Ed-1, Cet-4* (Jakarta:RajawaliPers, 2013), h. 172.

- 5) Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati pada awal kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan yang ditetapkan di muka.
- 6) Kerugian finansial dari kegiatan usaha *mudharabah* harus ditanggung oleh *rabbul mal*, kecuali jika terbukti *mudharib* melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.
- 7) Kewajiban dari *rabbul mal* tersebut sebesar nilai investasinya kecuali dinyatakan lain dalam kontrak *mudharabah*.
- 8) *Mudharabah* dapat bervariasi tipenya yang dapat dengan satu atau banyak tujuan, bergulir atau periode tertentu, tergantung dengan kondisi yang ditetapkan.
- 9) *Mudharib* dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis *mudharabah* dengan persetujuan *rabbul mal*. Persyaratannya adalah *rabbul mal* tidak boleh memperoleh porsi keuntungan lebih besar dari pada porsi investasinya terhadap total investasi proyek *mudharabah*, kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal dari masing-masing pihak.

**e. Perkara yang membatalkan *Mudharabah Muqayyadah***

*Mudharabah* dianggap batal apabila ada hal-hal berikut:<sup>44</sup>

- a) Pembatalan, Larangan Berusaha, dan pemecatan

---

<sup>44</sup> Rahmat, Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 238

*Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

b) Salah seorang *Aqid* meninggal dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

c) Salah Seorang *Aqid* Gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

d) Pemilik Modal *Murtad*

Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan

oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergantung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan di antara para ahli warisnya.

e) Modal Rusak di Tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

## 2. Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

### a. Pengertian Akad *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

*Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak shahibul maal memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharibnya* telah ditetapkan oleh *shahibul maal*, Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Bagi hasil yang akan dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berasal dari proyek khusus. Bank syariah Bertindak sebagai agen yang mempertemukan kedua pihak, dan akan memperoleh *fee*. Dalam laporan

keuangan, *mudharabah muqayyadah off Balance Sheet* akan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan.<sup>45</sup>

Pada *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* Bank Syariah bertindak sebagai *arranger* dan mendapatkan *fee* sebagai *arranger*, pencatatan transaksi di Bank syariah secara *Off Balance Sheet*.<sup>46</sup> Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Skema ini disebut *off Balance Sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.<sup>47</sup> Akad ini untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.<sup>48</sup> Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana Bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan usaha. Pemilik dana dapat menetapkan waktu syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.<sup>49</sup> Syarat dari akad *mudharabah muqayyadah off Balance Sheet* ini dananya langsung disalurkan ke nasabah,

---

<sup>45</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed-1, cet-4 (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), h. 88

<sup>46</sup> NuruL Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010 ), h. .178

<sup>47</sup> Adiwarmman Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, Ed. 3. Cet.3 (Jakarta:PT. Raja Grafindo persada, 2006), h.213

<sup>48</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ed-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 41

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, Ed-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), H. 218



Bank menerima komisi, Bank menerbitkan bukti investasi khusus dan Bank mencatat di rekening administrasi.<sup>50</sup>

*Mudharabah muqayyadah* ini diaplikasikan oleh Bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah Bank dalam melakukan kegiatan *Monitoring* terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah.<sup>51</sup> Fungsi pokok bank adalah menghimpun dana dan memberikan kredit. Berkaitan dengan fungsinya, bank menjual pula berbagai produk jasa, yang tidak tercantum dalam neraca. Karena tidak tercantum dalam neraca, maka bisnis ini disebut sebagai bisnis luar neraca (*Off Balance Sheet busnis*), penghasilan yang diterima dari bisnis ini pada umumnya berupa upah (*fee*), karena itu bisnis ini sering pula disebut “*fee based banking business*”.<sup>52</sup>

#### **b. Ketentuan Akad *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet***

Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad *mudharabah*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>53</sup>

- 1) Pada akad *mudharabah muqayyadah*, pengelola modal (*mudharib*) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.

---

<sup>50</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Ed-1, cet-3* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 63

<sup>51</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Ed-1, Cet-1* (Jakarta Rajawali Pers, 2016), h. 62

<sup>52</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan, Cet-2* (Jakarta: Bumi Aksa, 2011 ), h. 140

<sup>53</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 158

- 2) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal dan mencampur modal dengan harta miliknya.
- 3) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudharabah* atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mudharabah*.
- 4) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- 5) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.<sup>54</sup>

**c. Karakteristik Akad *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet***

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus ini dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

---

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Cet-3* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 222

b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanahkan oleh pemilik dana.

c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan anatara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa *mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah*). Pada jenis *mudharabah* yang pertama, pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Pada jenis *mudharabah* yang kedua, pemilik dana memberi batasan kepada *mudharib*, diantaranya batasan itu misalnya jenis investasi, tempat investasi dan sebagainya.

**d. Kriteria Akad *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet***

*Mudharabah muqayyadah* yang berbentuk *off Balance Sheet*. Jenis *mudharabah* ini merupakan konsep penyaluran langsung dana *mudharabah* kepada para pelaksana usahanya. Adapun karakteristik yang utamanya adalah:

a) Dana sebagai tanda bukti simpanan bank Islam dalam menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank Islam wajib memisahkan dana dari rekening lainnya, simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik.

c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.<sup>55</sup>

### **3. Pengertian Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* menurut *Fiqh Muamalah***

Menurut *Fiqh Muamalah Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* merupakan konsep penyaluran langsung dana *mudharabah* kepada para pelaksana usahanya, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Pada Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* Bank syariah bertindak sebagai *arranger* dan mendapat *fee* sebagai *arranger*, Pencatatan transaksi di Bank Syariah secara *Off Balance Sheet*, Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan nasabah pembiayaan.<sup>56</sup> Dasar hukum dibolehkannya Akad ini merupakan yang dikemukakan para ulama *fiqh* tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 198, yaitu:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kerunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”(Q.S Al-Baqarah: 198).<sup>57</sup>

Dari surat Al-Baqarah ayat 198 dapat kita ketahui bahwa untuk mencari karunia Allah dapat dilakukan secara *mudharabah* dan hukumnya boleh dan sah.

---

<sup>55</sup> NuruL Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010 ), h. 93

<sup>56</sup> *Ibid*, Nurul Huda dan Mohammad Heykal, h. 78

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 31

## B. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terikat dengan judul tentang Akad *Mudharabah*, adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang di buat oleh Fadilah Ahmad pada tahun 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam universitas Islam Negri Raden Intan Lampung yang berjudul: “Analisis penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan *Mabrur* Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang).”

### a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan *mabrur* untuk biaya perjalanan ibadah haji pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang ?
- 2) Bagaimana alur pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan *mabrur* pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang ?

### b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan *mabrur* untuk biaya perjalanan ibadah haji pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana alur pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan *mabrur* pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.

c. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis merumuskan kesimpulan mengenai penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan *mabrur* Bank Syariah Mandiri KCP Belitang sudah melaksanakan sesuai dengan syariat Islam, hanya saja kurangnya sosialisasi atau penjelasan kepada nasabah yang masih belum paham tentang adanya akad *mudharabah mutlaqah* yang terdapat di dalam tabungan *mabrur* atau bahkan adanya nisbah di dalam akad *mudharabah mutlaqah* yang nasabah tidak mengetahuinya. Selain itu mengenai proses pembukaan sampai penutupan rekening BSM sudah sangat membantu, sangat memberikan kemudahan pada nasabah agar bisa mewujudkan suatu keinginannya mendapatkan nomer porsi haji dan berlanjut sampai ke tanah suci.

2. Skripsi yang di buat oleh Indri Ambarukmi pada tahun 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul: “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank (studi pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016).”

a. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016 ?

b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016.

c. Hasil kesimpulan

Dari hasil pengujian tersebut bahwa pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan pada bagi hasil *mudharabah* lebih besar pembiayaan dari pada pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diperoleh oleh bank syariah mandiri dari tahun 2009-2016.

3. Skripsi yang di buat oleh Zurrahmah Arif pada tahun 2011, Fakultas Syariah dan Hukum universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul: “Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* Untuk Sektor Pertanian di BPRS Al-Barokah Depok.”

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pandangan *Fiqh muamalat* mengenai akad *mudharabah*?
- 2) Seperti apa aplikasi akad *mudharabah* untuk sektor pertanian di BPRS Al-Barokah?
- 3) Apakah sesuai antara mekanisme pengajuan pinjaman *mudharabah* untuk sektor pertanian dengan aplikasi menurut analisis penulis?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis kesesuaian antara praktek pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian di BPRS Al-Barokah dengan yang ada di literatur *Fiqh muamalat*.
- 2) Untuk mengetahui langkah-langkah pengajuan proses pembiayaan di BPRS Al-Barokah.

c. Hasil kesimpulan

Menurut pandangan *Fiqh Muamalat* akad *mudharabah* yang dipraktekkan di BPRS Al-Barokah adalah *mudharabah* Shahih. Jadi dari segi *mudharabah* yang dilakukan antara petani dan BPRS Al-Barokah sebenarnya tidak ada kesalahan menurut *fiqh muamalat*. Karena smuanya sudah sesuai dengan yang penulis temukan di literatur.

Peran BPRS disini adalah menyediakan dana untuk membeli peralatan pertanian seperti pasair, sekam, pupuk. Petani tesebut mencoba beberapa jenis sayuran, sedangkan untuk memasarkan hasil panennya sipetani memilih supermarket. Perlu diketahui disini BPRS tidak ikut serta dalam hal pemasaran, BPRS hanya membantu nasabah dalam hal pemberian pinjaman dana.

Menurut penulis ada yang salah dalam hal aplikasi akad *mudharabah* itu sendiri yaitu, BPRS Al-Barokah terlihat tidak begitu hati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Itu terbukti dengan tidak semua mekanisme pengajuan pembiayaan untuk akad *mudharabah* sama dengan aplikasi akadnya itu sendiri.

Dari 3 penelitian ini, ada beberapa letak perbedaan, yaitu:

1. Menganalisis tentang penerapan akad *Mudharabah mutlaqah* pada tabungan mabrur.
2. Mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bagi hasil Bank.



3. Mengetahui seperti apa tinjauan *fiqh muamalat* terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian.



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **A. Gambaran Umum Tentang BSM KC Kotabumi, Lampung Utara**

###### **1. Profil Bank Syariah Mandiri**

Nama : PT. Bank Syariah Mandiri

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.211, kel. Tanjung Aman

Telephone : 0724-22893

Call Center : BSM Call 14040 atau 021-29534040

Situs web : [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)

Jenis Usaha : Lembaga Keuangan Perbankan

###### **2. Sejarah Bank Syariah Mandiri**

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa dan mengalami *rush* atau

penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah sehingga harus dilukuidasi. Dengan keadaan seperti ini pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Di samping itu, dengan adanya krisis tersebut mulai berkembang pemikiran mengenai suatu konsep perbankan yang dapat membantu mengeluarkan Indonesia dari krisis yang berkepanjangan tersebut yaitu dengan melahirkan konsep perbankan berdasarkan prinsip syariah. Disisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 (empat) bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT.Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas PT. Bank Susila Bakti (BSB). PT.BSB merupakan salah satu Bank Konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT.Bank Dagang Negara dan PT.Mahkota Prestasi. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT.Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim pengembangan perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT.Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 september 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur B I No. 1/24/ KEP.BI/1999, Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT.Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT.Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H Atau Tanggal 1 November 1999.

PT.Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah

Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.<sup>58</sup>

### 3. Visi dan Misi

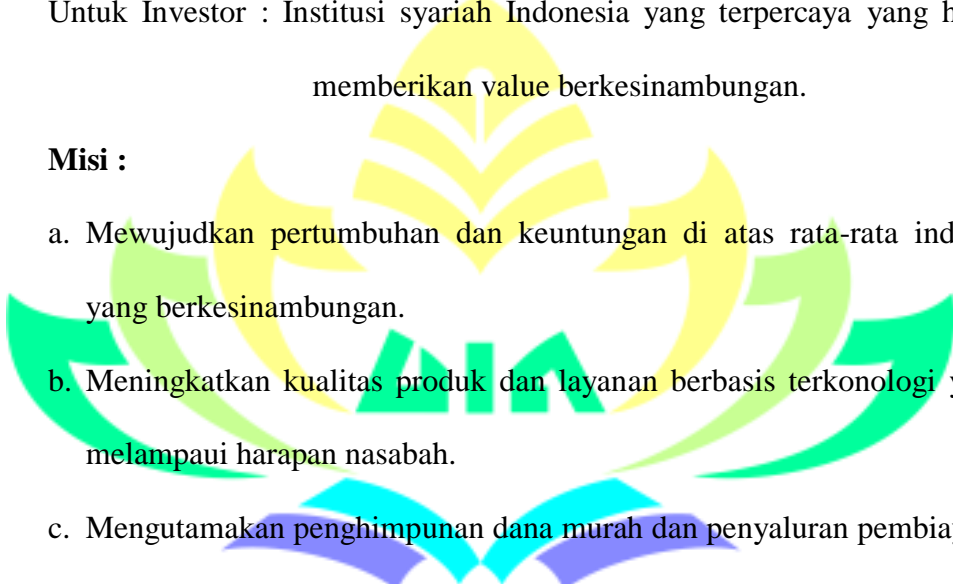
#### Visi :

Untuk Nasabah : BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.

Untuk Pegawai : BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

Untuk Investor : Institusi syariah Indonesia yang terpercaya yang harus memberikan value berkesinambungan.

#### Misi :

- 
- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
  - b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
  - c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
  - d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
  - e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
  - f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung.

---

<sup>58</sup> Laporan tahunan Bank Syariah Mandiri, (online), tersedia di : [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) (23 juni, 2019 )

#### 4. *Shared Value* ETHIC dan 10 Perilaku Utama Bank Syariah Mandiri

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSM, insan-insan BSM perlu menerapkan nilai-nilai yang relatif seragam. Insan-insan BSM telah menggali dan menyepakati nilai-nilai dimaksud, yang kemudian disebut BSM *shared Value*. *Shared Value* Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC” yaitu:

- a. *Exceleence* : Bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik.
- b. *Teamwork* : Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
- c. *Humanity* : Peduli, ikhlas, memberikan nasihat dan mengalirkan berkah bagi Negara.
- d. *Integrity* : jujur, taat, amanah dan bertanggung jawab.
- e. *Customer Focus* : Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).<sup>59</sup>

Terdapat 10 perilaku utama Bank Syariah Mandiri, yaitu :

- a. *Prudence* : menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terus-menerus.
- b. *Competence* : meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi banker.
- c. *Trusted and Trust* : mengembangkan perilaku dapat dipercaya.
- d. *Contribution* : memberikan kontribusi positif dan optimal.

---

<sup>59</sup> Bank Syariah Mandiri, (online), tersedia di : [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id) (23 juni,

- e. *Social and Environment Care* : memiliki kepedulian yang tulus terhadap lingkungan dan sosial.
- f. *Inclusivity* : mengembangkan perilaku mengayomi.
- g. *Honesty* : jujur.
- h. *Good Government* : melaksanakan tata kelola yang baik.
- i. *Innovation* : mengembangkan proses, layanan dan produk untuk melampaui harapan nasabah.
- j. *Service Excellence* : memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan.<sup>60</sup>

## 5. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri<sup>61</sup>

Struktur kepengurusan yang tersusun merupakan gambaran dari adanya sebuah organisasi yang menjadi ujung tombak dari berjalannya sebuah program kerja yang menjadi dasar dalam rangka mencapai tujuan dalam sebuah organisasi tersebut, oleh karenanya harus memiliki personil yang mewakili dari aspek dan keahlian yang yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi.

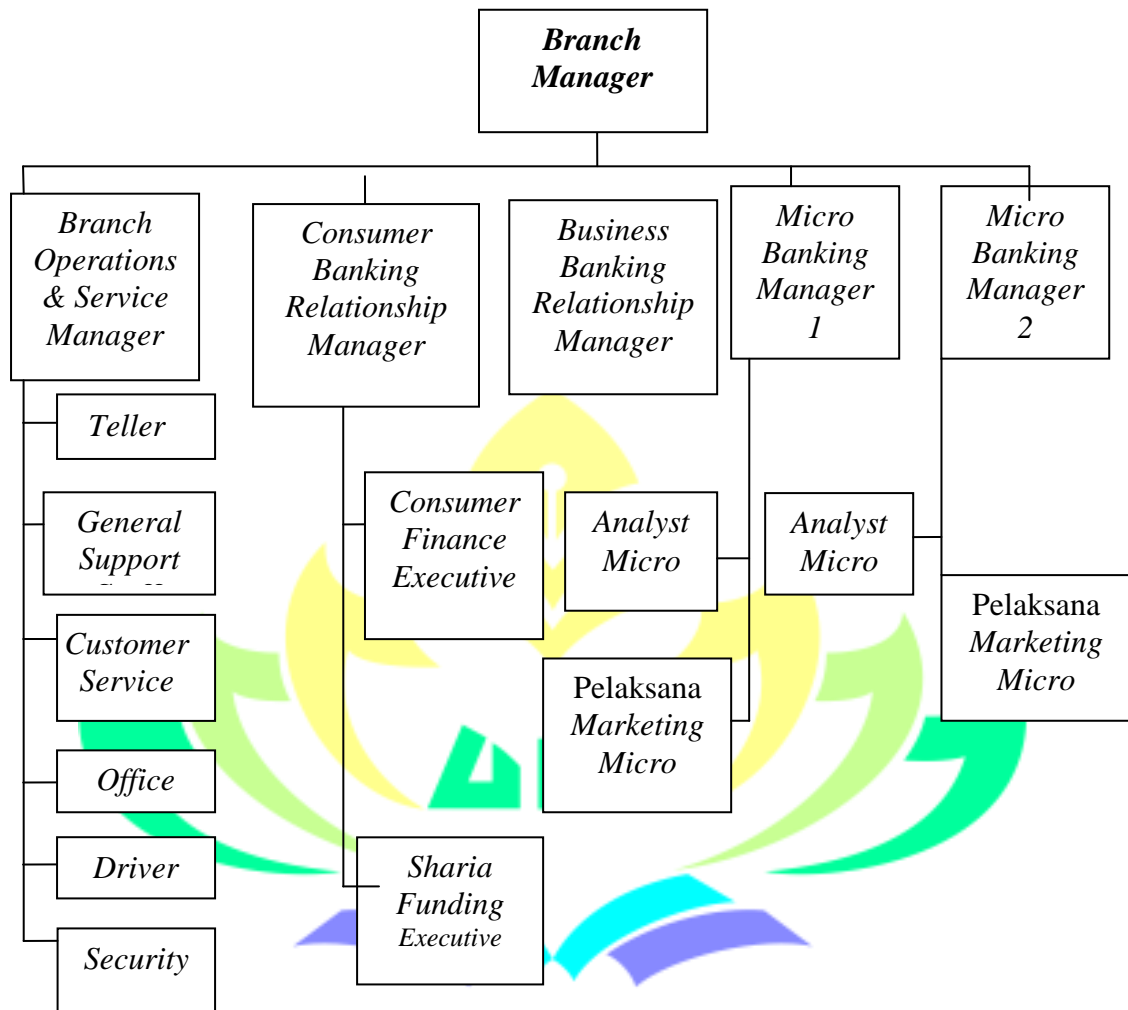
---

<sup>60</sup> Bank Syariah Mandiri, (online), tersedia di : [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id) (23 juni, 2019)

<sup>61</sup> Website Resmi PT. Bank Syariah Mandiri dapat diakses di [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id) (23 juni, 2019)

Gambar 1

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kotabumi



Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kotabumi

## 6. Tugas Dan Fungsi Bagian Operasional

### a. Branch Manager

- 1) Mengelola pelaksanaan sistem dan pemasaran perkreditan, dan dana jasa bank.
- 2) Memasarkan kredit kepada nasabah/bukan nasabah.



- 3) Melakukan penjualan silang (*Cross selling*) produk dan jasa bank.
- 4) Memasarkan dana dan jasa kepada nasabah/bukan nasabah.
- 5) Mengelola pelayanan produk dan jasa.
- 6) Mengelola pembinaan kepada nasabah prima.
- 7) Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur dibidang pelayanan nasabah dan operasional bank.
- 8) Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengelola pelayanan dan produk jasa bank.
- 9) Mengelola pelayanan kartu ATM.
- 10) Mengelola pelayanan transaksi kas.
- 11) Mengelola kas ATM.
- 12) Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem prosedur, peraturan BI, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 13) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kegiatannya.

#### **b. Branch Operations & Service Manager**

- 1) Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh aktivitas operasional.
- 2) Mengawasi dan memeriksa laporan operasional bank.
- 3) Mengawasi operasional dana pensiun lembaga keuangan.
- 4) Mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisien operasi bank.
- 5) Memangkas habis biaya-biaya operasi yang sama sekali tidak menguntungkan bank.
- 6) Meneliti teknologi baru dan metode alternative efisiensi.

### **c. General Support Staff**

- 1) Mengadministrasikan seluruh file-file yang berhubungan dengan pajak, ketenagakerjaan, periklanan, kerjasama dengan pihak dispenda dan lainnya.
- 2) Menata sumber-sumber bacaan (buku-buku, diklat, paper, hasil riset, kliping, majalah, dan lain-lain) yang ada di perusahaan sehingga untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan tugas.
- 3) Mengagendakan seluruh aktivitas surat menyurat baik antar unit maupun dengan pihak luar sehingga dapat memberikan informasi secara cepat dan tepat.

### **d. Teller**

Teller selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran utang.

Tugas teller juga mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank, dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan/*policy* pekerjaan.

### **e. Customer Service**

Untuk melayani pelanggan/consumer yang datang langsung ke BSM ataupun yang melalui telepon.

### **f. Customer Banking Relationship Manager**

- 1) Menciptakan dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan seluruh segmen yang berbeda dan mempertahankan pengetahuan tentang pasar termasuk tren.

- 2) Mengelola tim customer relationship dan memastikan pelayanan terbaik untuk pelanggan dan mencapai target penjualan.
- 3) Memastikan tim memiliki keterampilan dan alat yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien, serta dapat bekerjasama dengan kepala penjualan lapangan.
- 4) Membuat laporan yang digunakan sebagai tolak ukur pencapaian sesuai dengan *Key Performance Indicator* (KPI) termasuk rencana untuk memperbaiki kekurangan.
- 5) Menindak lanjuti feedback pelanggan untuk meningkatkan layanan pelanggan.
- 6) hal harga, ketersediaan kualitas, jenis dan layanan.

**g. Consumer Financing Executive**

- 1) Menyediakan barang pesanan konsumen berdasarkan kebutuhan dengan sistem pembiayaan.
- 2) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
- 3) Menjelaskan ketentuan dalam pembiayaan pada konsumen.
- 4) Memutuskan pengajuan pembiayaan konsumen.

**h. Sharing Funding Executive**

- 1) Melakukan aktivitas marketing.
- 2) Menjual produk funding yaitu tabungan Giro, deposito kepada nasabah diluar lokasi cabang.

- 3) Melakukan proses akuisi nasabah baru diluar lokasi cabang, meliputi pengisian aplikasi pembukaan rekening dan melengkapi dokumen pembukaan rekening.
- 4) Menjelaskan ketentuan, fitur dan benefit produk yang dipasarkan secara lengkap dan benar kepada calon nasabah pada saat menjual produk.
- 5) Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen nasabah.
- 6) Membubuhkan stempel “copy sesuai aslinya”. Tanggal dan paraf pada semua dokumen persyaratan legalitas asli yang sudah di fotocopy.
- 7) Menyerahkan pembukaan rekening kepada customer service dengan konsisi aplikasi sudah terisi lengkap dengan dokumen penyerta dan valid.
- 8) Memberikan tanda terima buku tabungan dan kartu ATM yang sudah diterima nasabah kepada koordinator SFE.
- 9) Permintaan pengambilan setoran dana dari nasabah harus dikonfirmasi ke *Syariah Funding Executive* (SFE) H-1.
- 10) Dalam proses pengambilan secara setoran dana dari nasabah, koordinator SFE membuat surat perintah pick-up dana kepada SFE, dengan memuat daftar nasabah, tanggal, jumlah, no rekening, dan kolom tanda tangan nasabah.
- 11) Setelah selesai melakukan kegiatan marketing, setiap hari SFE membuat laporan kepada koordinator SFE di cabang.

#### **i. Business Banking Relationship Manager**

- 1) Mengelola hubungan IS dan unit bisnis atau proses bisnis pemilik.
- 2) Mengelola layanan ITC dan harga.
- 3) Bernegosiasi SLA.
- 4) Menyelesaikan perselisihan antara penerima layanan dan penyedia layanan.
- 5) Memastikan standar ITC ditetapkan/diamati.
- 6) Merekomendasikan penggunaan baru dari ITC untuk meningkatkan kinerja bisnis.
- 7) Bertindak sebagai broker layanan ITC.
- 8) Tetap mengikuti berkomunikasi pengguna ITC pesaing.
- 9) Mengelola harapan dan permintaan layanan ITC.

#### **j. Analyst Micro**

- 1) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan kredit.
- 2) Analisa dan scoring kredit.
- 3) Memberikan rekomendasi/usulan keputusan kredit MMM.
- 4) Melakukan verifikasi nasabah/dokumen/agunan bila diperlukan atas perintah dari cluster manager.
- 5) Melaksanakan compliance review kelengkapan dokumen input aplikasi kredit dan melakukan pembentukan customer information file (CIF).
- 6) Melakukan monitoring pembayaran angsuran kredit dengan mencetak daftar nasabah yang jatuh tempo.

#### **k. Pelaksanaan Marketing Micro**

- 1) Membantu area manager dalam tugas keseharian yang berhubungan dengan tender seperti berikut ini dan tidak terbatas pada memonitor pendaftaran, tender, prakualifikasi, submission dan bekerjasama dengan Customer Service Dept dalam mempersiapkan dokumennya.
- 2) Hadir dalam rapat lelang, rapat pembukaan lelang dan rapat negosiasi.
- 3) Membantu area manager dalam follow up opportunity project baru customer, memainkan hubungan baik dengan customer dan menambah networking dengan customer-customer baru.
- 4) Membantu mempersiapkan sales activity report.

#### **l. Micro Banking Manajer**

- 1) Memimpin dan mengelola unit kredit micro.
- 2) Mengembangkan portofolio kredit.
- 3) Melakukan supervise kredit.
- 4) Mengkoordinir tim sales.
- 5) Memberi keputusan kredit sesuai kewenangan.
- 6) Menangani administrasi kredit.
- 7) Melakukan monitoring dan penagihan.

#### **7. Produk-produk Bank Syariah Mandiri**

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang memiliki beragam produk untuk memfasilitasi masyarakat terhadap kebutuhan

keuangan. Adapun produk-produk Bank Syariah Mandiri yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai berikut:

**a. Produk Penghimpunan**

1) Tabungan BSM

Tabungan BSM merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat jam kas dibuka. Karakteristik dari tabungan syariah mandiri, yaitu :

- a) Berdasarkan akad *murabahah mutlaqah*.
- b) Menggunakan mata uang Rupiah, Dollar Amerika, dan Dollar Singapura.
- c) BSM Net Banking dan BSM Mobile Banking.
- d) ATM dan Debit Card.
- e) Tabungan dengan bagi hasil yang menarik, aman dan terjamin.
- f) Dapat ditarik ataupun disetor di seluruh cabang Bank Syariah Mandiri.
- g) Nasabah dapat menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah melalui tabungan Syariah Mandiri.

2) BSM Tabungan Mabrur

Tabungan MABRUR adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan untuk membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, adapun karakteristik dari tabungan MABRUR, antara lain :

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.
- b) Sarana untuk perencanaan ibadah haji.
- c) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Manfaat Tabungan MABRUR, antara lain :

- a) Bebas biaya administrasi bulanan.
- b) Kemudahan pengurusan administrasi dokumen perjanjian haji.
- c) On-Line dengan SISKOHAT Departemen Agama.
- d) Setoran ringan serta tersedia telangan untuk pelunasan BPIH.
- e) On-Line antar cabang.

### 3) Tabungan Berencana BSM

Tabungan berencana BSM merupakan simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan. Produk tabungan dengan jangka waktu, dana dan tujuan investasinya dapat ditentukan secara fleksibel oleh nasabah dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi cuma-cuma. Adapun manfaat dari tabungan berencanan BSM, antara lain :

- a) Memudahkan mengatur rencana kebutuhan dana jangka menengah dan panjang.
- b) Bagi hasil yang menguntungkan.
- c) DI-civer dengan asuransi jiwa.



d) Nasabah tidak perlu membayar premi asuransi.

#### 4) Deposito BSM

Deposito Syariah Mandiri merupakan sarana investasi berjangka waktu tertentu yang diketahui berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*.

### b. Produk Pembiayaan

#### 1) Pembiayaan BSM Edukasi

Pembiayaan edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah, perguruan tinggi lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran ajaran tahun semester baru berikutnya dengan akad ijarah multijasa.

#### 2) Pembiayaan BSM Griya

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (*konsumtif*), baik baru maupun bekas, dilingkungan developer maupun non developer, dengan sistem *murabahah*. Dengan tujuannya memberikan kemudahan kepada Nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah.

#### 3) Pembiayaan BSM Implan

BSM Implan merupakan pemberian fasilitas pembiayaan consumer kepada sejumlah karyawan (*kolektif*) dengan rekomendasi perusahaan atau instansi (*approve company*), dimana pembayaran

angsurannya dikoordinasi oleh perusahaan atau instansi melalui pemotongan gaji langsung. Akad yang digunakan pada pembiayaan IMPLAN adalah wakalah wal murabahah atau wakalah wal ijarah yaitu:

- a) Wakalah adalah akad antara BSM dan perusahaan atau instansi untuk verifikasi kelengkapan awal, merekomendasikan karyawan atau anggotanya untuk mengajukan pembiayaan dan collection (potong gaji).
- b) Murabahah adalah akad antar BSM dan karyawan atau anggota untuk pembelian barang.
- c) Ijarah antara BSM dan karyawan atau anggota untuk memperoleh manfaat atas jasa pendidikan.

#### 4) Pembiayaan Resi Gudang BSM

Pembiayaan Resi Gudang adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas atau produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas atau produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen (*independently controlled warehouse*). Akad pembiayaan pada pembiayaan resi gudang disesuaikan dengan skema usaha nasabah (tailor made), dapat berupa pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk para Anggotanya (PKPA) yaitu penyaluran pembiayaan melalui koperasi untuk pemenuhan

kebutuhan consumer pada anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

#### 5) Gadai Emas BSM

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan diperuntukkan untuk perorangan. Akad Pembiayaan ini antara lain:

- a) Akad yang digunakan adalah akad Qardh dalam rangka Rahn.
- b) Qardh dalam rangka Rahmadalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.
- c) Biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah.

#### 6) Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Yaitu produk investasi terikat syariah mandiri yang bertujuan untuk menolong nasabah yang tidak memiliki dana, tidak memiliki jaminan tetapi memiliki usaha, suatu produk dengan karakteristik sebagai berikut:

- a) Investor (shahibul maal) menginvestasikan dananya kepada bank disertai dengan persyaratan bahwa investasi tersebut dijaminan kepada Bank atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank oleh pelaksana usaha tertentu.
- b) Menginvestasikan dananya kepada bank disertai dengan pernyataan bahwa investasi tersebut dijaminan kepada Bank

atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Kepada pelaksanaan Usaha tertentu.

- c) Atas investasi tersebut, investor memperoleh *return* dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Pelaksana Usaha.
- d) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
- e) Investasi terikat syariah mandiri tidak dibukukan dengan menggunakan *Off Balance Sheet*.
- f) Risiko pembiayaan tetap ada pada bank, namun risiko ini dimitigasi dengan adanya jaminan berupa investasi Terikat Syariah Mandiri.
- g) Penyajian investasi terikat Syariah Mandiri dalam neraca Bank, dilakukan sebagai berikut:
  - a) Dana milik *investor* pada pos kewajiban Dana Investasi.
  - b) Penyaluran dana pada pos penyaluran investasi terikat syariah mandiri.

#### 7) Pembiayaan Kepada Pensiun

Pembiayaan ini digunakan bagi para pensiun yang Penyaluran fasilitas pembiayaan komersial atau consumer kepada pension PNS, dimana pembayaran angsurannya dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima setiap bulanannya, yang ingin mengambil pembiayaan ini dengan jaminan SK pensiun yang dimiliki.

#### 8) Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesi di bidang kedokteran atau kesehatan untuk membeli peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* adalah akad jual beli antara Bank dan nasabah, dimana bank membelu barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

#### 9) Pembiayaan Umrah

Produk pembiayaan umrah BSM adalah pembiayaan jangka pendek , salah satu upaya BSM untuk memfasilitasi kemudahan dan keringanan kepada calon nasabah dalam memenuhi kebutuhan perjalanan umrah yang selama ini belum terakomodir melalui pembiayaan secara syariah dengan menggunakan akad *ijarah*.

#### 10) BSM Warung Mikro

BSM Warung Mikro merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan usaha kecil dengan limit pembiayaan dimana diajukan antara Rp.10.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000,- . pembiayaan ini diperuntukan bagi perorangan (PNS, Pegawai Swasta) yang memiliki usaha dan bagi Badan Usaha.

#### 11) Pembiayaan Mudharabah BSM

Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank disepakati.

#### 12) Pembiayaan Musyarakah BSM

Pembiayaan Musyarakah BSM yaitu pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

#### 13) Pembiayaan Murabahah BSM

Pembiayaan Murabahah BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

#### 14) Pembiayaan BSM Oto

Yaitu bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki kepemilikan kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan system *mudharabah*.

#### 15) Pembiayaan BSM Dana Berputar

Pembiayaan dana berputar adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk modal kerja tetap (*permanent working capital*). Bersifat pembubaran sendiri (*self liquidating*) seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode

terkait. Produk pembiayaan ini diperuntukan bagi individu atau perorangan dan perusahaan atau Badan Hukum. Akad yang digunakan adalah akad musyarakah yang membiayai jenis usaha yang halal.

### c. Produk Jasa Bank Syariah Mandiri

Terdapat berbagai macam produk jasa di Bank Syariah Mandiri diantaranya, yaitu :

Tabel 1  
Produk jasa Bank Syariah Mandiri

No	Jasa produk	Jasa Operasional	Jasa Investasi
1	BSM Card	BSM Transfer Lintas Negara <i>western union</i>	Reksadana
2	BSM SMS <i>Banking</i>	BSM <i>Inkaso</i>	
3	BSM <i>Mobile Banking</i>	BSM <i>Intercity Clearing</i>	
4	BSM <i>Net Banking</i>	BSM RTGS	
5	BSM Sentra Bayar	BSM Kliring	Sukuk Negara Ritel
6	Pembayaran Melalui Menu Pemindahan Bukuan di ATM	Transfer Dalam Kota	
7	BSM Jual Beli <i>Valas</i>	BSM Transfer <i>Valas</i>	
8	BSM <i>Elektronik Payroll</i>	BSM Pajak <i>Online</i>	
9	Transfer Uang Tunai	BSM <i>Refrensi Bank</i>	
10	BSM <i>E-Money</i>	<i>BSM Standing Order</i>	
11	Keamananku	<i>BSM Payment Poin</i>	

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri KCP kotabumi

### B. Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* di BSM

Kebutuhan yang banyak dan meningkatnya bahan pangan yang sangat tinggi menyebabkan timbulnya ide-ide kreatif yang dikeluarkan oleh seorang

pemilik modal. untuk menanamkan modalnya ke pihak Bank agar modal yang dititikan tersebut bisa berkembang sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan pemilik modal. Oleh karena itu para pengusaha membutuhkan modal untuk membuka usaha, sehingga pengusaha tersebut mengajukan pinjaman kepada Bank untuk menjalankan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri, maka diperoleh keterangan sebagai berikut :

Menurut ibu Junaini, Akad *mudharabah muqayyadah* ini suatu pembiayaan yang membiayai dana untuk kita yang ingin membuka usaha namun tidak mempunyai modal, sehingga dengan keterbatasan modal tersebut ibu Junaini ini mengajukan pinjaman untuk membuka usahanya. Dengan adanya syarat-syarat yang telah dilengkapi, melakukan survei dari pihak Bank sehingga pihak Bank bisa mempertimbangkan kita bisa atau tidak mendapatkan dana pembiayaan tersebut.<sup>62</sup>

Menurut bapak Suranto, akad ini merupakan pinjaman dana untuk membuka usaha tetapi usahanya di batasi oleh pemilik modal dengan batasan jenis usaha, lokasi usaha, dan lain-lain. Sehingga kita hanya bisa menjalankan usaha tersebut. Dengan adanya keinginan untuk membuka usaha, disinilah ada pemikiran untuk meminjam dana kepada pihak bank. Jika tidak dapat membayar angsuran, maka pihak bank bertindak sebagaimana kesepakatan bersama dan mempertimbangkan apa konsekuensi yang akan saya terima.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara terhadap ibu Junaini, selaku salah satu Nasabah di Bank Syariah mandiri, pada tanggal, 03 Mei 2019.

<sup>63</sup> Wawancara terhadap bapak Suranto, selaku salah satu Nasabah di Bank Syariah mandiri, pada tanggal, 06 Mei 2019.



Menurut ibu Aisyah Amini, Akad ini adalah akad pembiayaan untuk mendapatkan modal usaha dan menjalankan usaha yang telah di batasi oleh pemilik modal. Untuk mendapatkan dana tersebut, kita mengajukan pembiayaan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Bank. Yang menyebabkan saya ingin meminjam dana ini yaitu dengan keinginan saya membuka usaha namun terbatasnya modal.<sup>64</sup>

Menurut bapak Suparman, Akad ini merupakan perjanjian untuk menjalankan usaha yang telah disediakan dan keuntungan di bagi dua. Untuk meminjam dana ini kita harus menyerahkan syarat-syarat yang telah di berikan oleh Bank. Jika nanti tidak bisa membayar dari pihak bank akan bertindak berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui kedua pihak.<sup>65</sup>

Menurut ibu Lina Dewi, pembiayaan ini untuk orang yang ingin menjalankan usaha yang sudah direncanakan oleh pemilik modal dari awal modal itu di titipkan di Bank.<sup>66</sup>

Menurut pak Wandu, pembiayaan ini untuk orang yang ingin membuka usaha namun bingung untuk masalah dana. Untuk keuntungannya di bagi tergantung dengan hasil usaha yang benar-benar terjadi.<sup>67</sup>

Menurut ibu Puspita, akad ini merupakan pembiayaan untuk membuka suatu usaha, namun pemilik modal membatasi syarat kepada peminjam dalam tempat, jenis usaha yang akan dijalani, dan waktu tertentu.<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara ibu Aisyah amini, selaku Nasabah di Bank Syariah Mandiri, pada Tanggal 06 mei 2019.

<sup>65</sup> Wawancara terhadap bapak Suparman, selaku salah satu Nasabah di Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 06 mei 2019.

<sup>66</sup> Wawancara ibu Lina dewi, selaku nasabah di Bank Syariah Mandiri, 06 mei 2019

<sup>67</sup> wawancara bapak Wanda, selaku nasabah di Bank Syariah Mandiri, 03 mei 2019

Menurut bapak Sucipto, ini adalah akad untuk kita yang ingin membuka usaha namun kita tidak ada dana, sehingga dengan keinginan kita tersebutlah akhirnya kita mengajukan pembiayaan dengan tujuan menjalankan usaha yang telah disediakan oleh pemilik modal. Untuk mengajukan pembiayaan ini, setiap nasabah menyediakan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank sebagai bahan pertimbangan dalam pembiayaan ini.<sup>69</sup>

Menurut bapak Wagiono, dimana akad ini merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana, dimana pemilik modal sudah menyediakan modal dan jenis apa yang akan dijual, waktunya kapan, dan lokasinya dimana. Hasil usahanya dibagi dua sesuai kesepakatan bersama.<sup>70</sup>

Menurut ibu Desma, akad ini merupakan kerjasama, dimana ada orang yang ingin membuka usaha namun dia tidak cukup dalam hal pendanaan dan bingung ingin membuka usaha apa. Hasil dari usahanya nanti dibagi dua kepada pemilik modal.<sup>71</sup>

Menurut Adi Nugroho, Akad ini adalah suatu kontrak yang sesuai pada prinsip bagi hasil dengan cara salah satu orang memberikan modalnya kepada yang melakukan bisnis dan satu pihak membagikan keuntungan atau kerugian sesuai isi perjanjian bersama. Dan yang menjadi bahan pertimbangan pihak Bank menyetujui pembiayaan yaitu dengan menilai sifat atau karakter

---

<sup>68</sup> Wawancara ibu Puspita, selaku nasabah Bank Syariah Mandiri, 06 mei 2019

<sup>69</sup> Wawancara bapak Sucipto, selaku nasabah Bank Syariah Mandiri, 03 mei 2019

<sup>70</sup> Wawancara bapak Wagiono, selaku nasabah Bank Syariah Mandiri, 07 mei 2019

<sup>71</sup> Wawancara ibu Desma, selaku Nasabah Bank Syariah Mandiri, tanggal 07 mei 2019

seseorang, kemampuan nasabah dalam membayar kredit, pekerjaan yang dimiliki nasabah, kondisi ekonomi nasabah, dan jaminan yang diberikan.<sup>72</sup>

Menurut Riski Setiawan, Akad *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* yaitu kontrak antara 2 orang dimana satu orang sebagai pemilik dana yang memberikan batasan pengelola mengenai dana, lokasi, cara, dan sektor usahanya. Sehingga pemilik dana mempercayakan seluruhnya kepada pihak pelaksana usaha dengan imbalan dari sebagian keuntungannya dan pihak Bank hanya menjadi pihak yang mempertemukan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Bagi hasil diantara keduanya berasal dari proyek khusus. Bank Syariah, bertindak sebagai agen yang mempertemukan keduanya dan bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Adapun antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Keuntungan terhadap usaha dibagi menurut kesepakatan diawal kontrak. Jika kerugian diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Apabila pengelola tidak menjalankan usahanya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal, maka pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk masalah keuangan.<sup>73</sup>

Menurut Syaiful Anwar, Akad ini merupakan suatu kemitraan yang berlandaskan bagi hasil dimana seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan keduanya membagi keuntungan dan

---

<sup>72</sup> Wawancara Adi Nugroho, selaku *Consumer Financing Executive* di Bank Syariah Mandiri, pada Tanggal 02 mei 2019.

<sup>73</sup> Wawancara kepada Riski setiawan, selaku *Analyst Micro*, di Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 02 mei 2019.

menanggung kerugian yang sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati. Pelaksanaan denda pembiayaan ini terjadi ketika si nasabah menunda-nunda pembayaran dan dapat disebut dengan wanprestasi. Adanya pelaksanaan denda di Bank Syariah Mandiri ini merupakan solusi yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran, karena bank syariah tidak ingin berlaku dzalim kepada pemilik dana. Karena ebanyakan nasabah yang menunda-nunda pembayaran jika tidak ada denda maka nasabah akan menjadi lalai dalam pembiayaan, sehingga sampai ada yang menunda-nunda pembayaran sampai satu tahun bahkan lebih. Denda ini juga dikenakan sama rata dengan keseluruhan nasabah pembiayaan.<sup>74</sup>

Berikut ini salah satu nasabah yang meminjam dana di Bank Syariah Mandiri, yaitu:

Bapak Wandi adalah salah satu nasabah Bank Syariah Mandiri yang meminjam dana di Bank tersebut untuk modal usaha warung makan yang menjual gorengan, pecel, dan nasi uduk di jalan prapatan kebon empat. Dengan peminjaman modal sebesar Rp.1.500.000 dalam jangka waktu pengembalian 6 bulan dengan Jaminan BPKB dan sertifikat rumah. Pak wandi memulai usahanya setelah pencairan dana peminjaman tersebut dan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama (tidak disebutkan berapa nominalnya).<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara kepada Saiful Anwar, selaku *Micro Banking*, di Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 03 mei 2019.

<sup>75</sup> wawancara bapak Wanda, selaku nasabah di Bank Syariah Mandiri, 28 September 2019.

### C. Resiko Pembiayaan Dan Tingkat Kesehatan di BSM

Menurut Riski Setiawan, Cidera janji dalam pembayaran yang mengakibatkan tunggakan atau ada potensi kerugian di usaha nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko pada Bank.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya resiko pembiayaan, yaitu:

- a. Faktor *Internal* (berasal dari pihak Bank)
  - 1) Kurang baiknya atas pemahaman atau bisnis nasabah,
  - 2) Kurang dilakukannya evaluasi keuangan nasabah,
  - 3) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan kegiatan usaha pencegahan dan penanganan penyalahgunaan kredit)
- b. Faktor *Eksternal* (berasal dari pihak luar)
  - 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
  - 2) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
  - 3) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.<sup>76</sup>

Menurut Rohma Setia Andini, menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mengatasi dan mengantisipasi resiko tersebut, yaitu dengan adanya sistem survei pada saat calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan, kemudian adanya anggunan/jaminan nasabah yang pada saat akad pencairan (setelah di ACC), jaminan yang asli dititipkan di Bank. Sehingga ketika

---

<sup>76</sup> Wawancara kepada Riski setiawan, selaku *Analyst Micro*, di Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 02 mei 2019.

nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya, maka dengan cara musyawarah antara nasabah dan juga pengurus pembiayaan untuk menentukan jalan keluarnya. Faktor yang menyebabkan nasabah tidak bisa melunasi pembiayaannya karena nasabah sedang dilanda musibah, seperti: sakit, pihak yang bersangkutan meninggal dunia, dan sedang masa pengobatan atau operasi.<sup>77</sup> *Mudharabah* merupakan salah satu investasi pembiayaan yang memiliki resiko cukup tinggi, diantaranya : *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.<sup>78</sup>

Sementara itu, pendapat yang tidak berbeda mengenai resiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

- 1) Dana yang diperoleh nasabah disalah gunakan untuk keperluan tujuan lain menyimpang dari kesepakatan semula.
- 2) Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, atau kelalaian yang tidak disengaja.
- 3) Nasabah tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis usaha.<sup>79</sup>

Penilaian kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu: pemilik, pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawasan

---

<sup>77</sup> Wawancara Rohma Setia Andini, selaku *Teller* Bank Syariah Mandiri, pada Tanggal 02 Mei 2019.

<sup>78</sup> Wawancara Adi Nugroho, selaku *Consumer Financing Executive* di Bank Syariah Mandiri, pada Tanggal 02 Mei 2019.

<sup>79</sup> Wawancara kepada Saiful Anwar, selaku *Micro Banking*, di Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 03 Mei 2019.

perbankan menetapkan tata cara penilaian kinerja bank umum syariah. Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan mengadakan penilaian atas faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan Bank. Penilaian terhadap profil resiko dilakukan terhadap berbagai macam jenis resiko termasuk resiko operasional, risiko reputasi, dan resiko kepatuhan. Sehingga penyaluran pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank.



## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* pada Bank Syariah Mandiri Kotabumi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara dan dokumentasi, beserta data kepustakaan yang diperoleh langsung dari buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu “Implementasi *Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* Pada Bank Syariah Mandiri menurut *Fiqh Muamalah* (studi pada Bank Syariah Mandiri cab. Kotabumi Lampung Utara)”. Maka sebagai langkah selanjutnya akan dianalisis data yang telah terkumpul untuk menjawab dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan dana pembiayaan *mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* pada Bank Syariah Mandiri, maka seorang nasabah harus memenuhi prosedur atau ketentuan yang berlaku pada Bank Syariah Mandiri.

Pelaksana pemberian pembiayaan bukanlah kegiatan yang jalan pintas. Namun dilakukan dengan cara sistematis dan berhari-hari. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan ini melewati proses yang panjang. Adapun proses dalam pemberian pembiayaan meliputi:

1. Surat Permohonan Pembiayaan, dimana surat permohonan ini harus diisi nasabah untuk melengkapi data-data nasabah. Dalam mengisi formulir ini juga harus dilengkapi dengan pas photo, photo copy KTP, photo copy kartu keluarga, photo copy BPKB dan faktur kendaraan (jika jaminan kendaraan



bermotor), dan dokumen lain yang bisa mendukung permohonan pembiayaan ini.

2. Proses evaluasi, yaitu dimana penilaian suatu permohonan bank tetap berpegang pada kehati-kehatian serta aspek lainnya. Sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat.

Proses penilaian dimaksud, meliputi:

- a. Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap. Dengan kata lain, permohonan yang tidak di dukung data dan dokumen yang lengkap tidak dapat diproses. Biasanya cepat atau lambatnya pemrosesan suatu permohonan pembiayaan, terutama ditentukan pada tahap ini.

- b. Proses penilaian.

Proses ini dilakukan melalui kantor pusat atau kanwil. bila dari kantor pusat ini di tolak, maka keputusan kantor pusat tersebut diteruskan ke pemohon yang bersangkutan. Namun jika pembiayaan ini dipenuhi, maka proses ini diteruskan ke pemohon untuk penanda tangan akad, pengamanan pembiayaan, realisasi, pemantauan, dan pelunasan/perpanjang.

Proses penilaian ini pun bisa dilakukan melalui kantor cabang. Jika ditolak, keputusan ini diteruskan ke nasabah pemohon. Namun jika di terima oleh unit penilaian, maka keputusan ini dibuatkan surat persetujuan yang memuat persyaratan, lalu penanda tangan akad pembiayaan, pengamanan pembiayaan, realisasi pembiayaan, pemantauan, dan pelunasan/perpanjang/ tambahan plafon/lainnya.

c. Format memo/nota penilaian.

Format ini meliputi informasi umum mengenai perusahaan, status hukum, dan pemegang saham.

Pada Bank Syariah Mandiri, akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* berupa akad tertulis. Akan tetapi, secara garis besar akad notaris tersebut berisi tentang:

- 1) Pihak yang melakukan perikatan (Bank dan nasabah).
- 2) Plafon (jumlah dana pembiayaan).
- 3) Margin atau bagi hasil.
- 4) Jangka waktu.
- 5) Agunan.
- 6) Hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan perikatan.
- 7) Penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

Sebenarnya ada dua akad dalam *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*. Pertama akad yang terjadi antara shahibul maal dengan pihak BSM. Kedua, akad yang terjadi antara mudharib dengan shahibul maal yang dalam operasionalnya diwakili oleh BSM. Adapun akad yang terjadi antara shahibul maal dengan BSM adalah akad perwakilan. Hal tersebut karena dalam *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* pihak BSM bertindak sebagai agen investasi. Sedangkan antara pihak BSM dengan *mudharib* terjadi akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Dari penilaian tersebut pihak Bank Syariah Mandiri mengetahui kondisi sebenarnya dari pemohon pembiayaan, sehingga proses penggunaan dan pengembalian dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini pencairan bisa atau tidak untuk meminjam pembiayaan tersebut. Dan yang menjadi bahan pertimbangan pihak Bank menyetujui pembiayaan yaitu dengan menilai sifat atau karakter seseorang, kemampuan nasabah dalam membayar kredit, pekerjaan yang dimiliki nasabah, kondisi ekonomi nasabah, dan jaminan yang diberikan.

**B. Resiko Pembiayaan terhadap kegagalan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya Dan Tingkat Kesehatan yang mendukung pelaksanaan akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* Di BSM**

Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bagi hasil/margin/pendapatan sewa dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang di biayainya. Resiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Resiko pembiayaan atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan suatu keadaan bank yang tidak sehat.

Faktor penyebab nasabah itu sendiri tidak bisa melunasi pembiayaannya disebabkan karena:

- 1) Nasabah banyak keperluan yang tidak terduga, sehingga dana untuk pembayaran digunakan terlebih dahulu dan setoran menunggak.
- 2) Usaha yang tidak lancer (daya beli masyarakat pada usahanya menurun).
- 3) Usaha nasabah mengalami kerugian besar (bangkrut).

Tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *mudharib* dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan *akad* yang telah disepakati. Tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Untuk penyelesaian pembiayaan ini pihak bank melakukan negosiasi terhadap nasabah yang bersangkutan dengan mencari solusi yang dapat memberikan kemudahan nasabah, memberikan perpanjangan waktu sesuai kemampuan nasabah, Setelah perpanjangan jangka waktu sudah dilakukan kemudian nasabah masih tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, maka Bank Syariah Mandiri akan mengambil tindakan dengan cara mengeksekusi jaminan. Eksekusi jaminan dapat dilakukan oleh bank dan nasabah, yaitu penjualan jaminan yang ada untuk menutupi hutang. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak agar hutang nasabah

tertutup dan bank juga tidak mengalami kerugian. Kedua belah pihak terselesaikan secara adil.

Penilaian kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu: pemilik, pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawasan perbankan menetapkan tata cara penilaian kinerja bank umum syariah. Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan mengadakan penilaian atas faktor-faktor tingkat kesehatan suatu Bank yang disebabkan karena aktifnya para nasabah dan bertambahnya nasabah baru dan hal inilah yang membuat tingkat kesehatan suatu bank.

### **C. Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* Menurut Fiqh Muamalah**

Menurut *Fiqh Muamalah Akad Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet* di perbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak pula para pakar dibidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu.

Ulama *Hanafiyah* dan *Imam Ahmad* membolehkan memberikan batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama *Syafi'iyah* dan *Malikiyah* melarangnya.

*Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila diikatkan dengan masa yang akan datang, seperti, “usahakan modal ini dimulai bulan depan”. Sedangkan ulama Syafi’iah dan Malikiyah melarangnya.*

Alasan yang dikemukakan para ulama fiqh tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 198, yaitu:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kerunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S Al-Baqarah: 198).<sup>80</sup>

Dari surat Al-Baqarah ayat 198 dapat kita ketahui bahwa untuk mencari karunia Allah dapat dilakukan secara mudharabah dan hukumnya boleh dan sah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tidak merugikan salah satu pihak, dalam arti salah seorang diantaranya yang berakad tidak akan berbuat curang untuk memperoleh nisbah yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Untuk menjamin kemaslahatan antara kedua belah pihak yang berakad tentunya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan antara pihak yang melakukan akad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban terpenuhinya ijab dan qabul, maka akad *Mudharabah Muqayyadah* ini telah sah.

---

<sup>80</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Ed-2, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 38

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, baik dalam bab II tentang landasan teori maupun pada bab III tentang laporan penelitian “Implementasi Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* menurut *Fiqh Muamalah* Pada Bank Syariah Mandiri (Study Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kotabumi, Kab. Lampung Utara)”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* di Bank Syariah dengan tujuan mendapatkan pinjaman dana usaha dengan mengajukan surat permohonan peminjaman dana dengan melengkapi syarat-syarat yang telah diberikan oleh Bank, kemudian pihak Bank menilai sifat atau karakter seorang nasabah, kemampuan nasabah dalam membayar kredit, pekerjaan yang dimiliki nasabah, kondisi ekonomi nasabah, dan jaminan yang diberikan. Sehingga pihak Bank akan mempertimbangkan terlebih dahulu menyetujui atau tidak nasabah meminjam dana tersebut.
2. Resiko pembiayaan disebabkan oleh kegagalan nasabah atau pihak lain dalam mengembalikan kewajibannya. Dengan beberapa faktor, yaitu: karena nasabah sedang sakit, pihak yang bersangkutan meninggal dunia, atau nasabah sedang masa operasi. Yang mempengaruhi Tingkat kesehatan

suatu Bank dikarenakan nasabah-nasabah yang aktif dan bertambahnya nasabah baru.

3. Akad *mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* Menurut *Fiqh Muamalah* hukumnya boleh dan sah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tidak merugikan salah satu pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis data di lapangan dan telah disimpulkan bahwa *Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* di Bank Syariah Mandiri Cab. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara menurut *Fiqh Muamalah* di bolehkan atau sah. Maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain:

1. Untuk melaksanakan proses kerjasama ini si pengelola dana berhati-hati menjalankan usahanya supaya tidak menimbulkan kerugian terhadap usahanya dan bisa membaca keadaan sekitar usahanya.
2. Dalam pelaksanaan akad ini setidaknya Bank Syariah Mandiri lebih berhati-hati dalam pembiayaan guna memikirkan resiko pada nasabah yang nantinya tidak bisa membayar angsuran dan sering memantau tingkat kesehatan pada bank.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Ruslan. (2015) *konstruksi Aakad*, dalam Jurnal *Ak-Adalah Hukum Islam*, No. 3.
- ADESy, FORDEBI (2016) *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, Ed-1, Cet-1* Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Aliyy. (2006) *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung:cv penerbit Diponegoro.
- Alfiah, Istiqamah. (2018) Skripsi: *pengaruh Capital Adequaty Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Non Performing Financing (NFF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil PT. Bank Syariah Mandiri, Bandar Lampung*.
- Ali, Zainuddin. (2010) *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ascarya (2013) *Akad dan Produk Bank Syariah, Ed-1, Cet-4* Jakarta:Rajawali Pers.
- Darmawi, Herman, (2011) *Manajemen Perbankan, Cet-2* Jakarta: Bumi Aksa.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama, (2006) *Al-Qur'an dan terjemahannya, Ed-2*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Haroen,Nasrun. (2007) *Fiqh Muamalah, Cet-2* Jakarta: Gaya media Pratama.
- Imam mustofa. (2016) *Fiqh Mu'amalah Kontemporer,Ed-1, cet-1* Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail. (2011) *Perbankan Syariah, Ed-1, Cet-2* Jakarta: Prenada Media Group.
- Janwari, Yadi. (2015) *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah, Cet-2* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adiwarman. (2006) *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan, Ed-3, Cet-3* Jakarta:PT. Raja Grafindo persada.

Laporan tahunan Bank Syariah Mandiri, (23 juni 2019) (online), tersedia di : [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id) .

Manan, Abdul. (2012) *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama, Ed-1, Cet-2* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Mardani, (2014) *Hukum Bisnis Syariah, Cet-1* Jakarta: Prenadamedia Group.

Mardani, (2015) *hukum sistem ekonomi Islam, Ed-1, Cet-1* Jakarta: Rajawalipers.

Mardani. (2012) *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, Ed-1* Jakarta: Prenada Media Group.

Muhamad. (2014) *Manajemen Dana Bank Syariah, Ed-1* Jakarta: Rajawali Pers,

Muhammad, (2013) *Metodelogi penelitian Ekonomi Islam, Cet-2* Jakarta: PT Grafindo Persada.

Muhammad. (2002) *Manajemen Bank Syariah, Ed-1* Yogyakarta: Upp Amp Ykpn.

Muthaher Osmad. (2012) *Akuntansi Perbankan Syariah, Ed-1, Cet-1* Yogyakarta: Graha Ilmuh.

Nurul, Huda dan Mohammad Heykal. (2010) *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Rauf, Fathurrahman. (2011) *Perbankan Syariah VIS A VIS Perbankan Konvensional: Tinjauan Hukum Islam atas konsep dan penerapan, Al-Adalah, vol. 10, no 1.*

Rianto, Bambang Rustam, (2013) *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Rozalinda. (2017) *Fiqh Ekonomi Syariah, cet-2* Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

Sahroni, Oni, Hasanuddin, (2016) *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, Ed-1, Cet-1* Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiono. (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alvabeta.

Suhendi, Hendi. (2014) *Fiqh Muamalah*, Ed-1, cet-9 Jakarta: Rajawali Pers.

Syafe'i, Rahmat. (2001) *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Tika Moh.Prabundu. (2006) *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara.

Umam, Khoerul. (2013) *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia.

Umam, Khotibul. (2016) *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Ed-1, Cet-1* Jakarta Rajawali Pers.

